

## THE INEQUALITY ALARM: SAVING ACEH BESAR'S ULTRA-POOR FROM A GROWING ECONOMIC ABYSS AMIDST FALLING POVERTY RATES

RUSMINI

Bappeda Kabupaten Aceh Besar

<sup>1</sup>ninialueglong@gmail.com

### Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena "Alarm Ketimpangan" di Kabupaten Aceh Besar, di mana penurunan angka kemiskinan makro sebesar 2,16% pada tahun 2025 tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hidup kelompok termiskin. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) justru meningkat menjadi 0,53, mengindikasikan jurang ekonomi yang semakin lebar di lapisan masyarakat terbawah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis SWOT dan kriteria William Dunn, penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi postur anggaran menjadi akar masalah utama. Dominasi belanja operasional sebesar 69,02% dan pemangkasan belanja modal infrastruktur dasar sebesar Rp15,8 miliar telah menghambat daya jangkau intervensi pemerintah terhadap kelompok miskin ekstrem. Sebagai solusi, Policy Paper ini merekomendasikan kebijakan mandatori Spending Re-design melalui penetapan ambang batas (capping) belanja operasional maksimal 40% dan pemulihan belanja modal minimal 30% pada SKPD pengampu. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan manifestasi kemanusiaan untuk memastikan kehadiran negara dalam menyediakan akses sanitasi, air bersih, dan modal produktif bagi warga yang selama ini terabaikan. Implementasi kebijakan ini secara konsisten diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan struktural dan mewujudkan keadilan sosial yang nyata di Kabupaten Aceh Besar.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan Ekstrem, Indeks Keparahan ( $P_2$ ), Spending Re-design, Aceh Besar, Efisiensi Anggaran.*

### Abstract

This study is motivated by the "Inequality Alarm" phenomenon in Aceh Besar Regency, where a 2.16% macro poverty reduction in 2025 was not accompanied by improved quality of life for the poorest groups. Conversely, the Poverty Severity Index ( $P_2$ ) rose to 0.53, indicating a widening economic gap within the lowest social strata. Using a qualitative case study approach with SWOT analysis and William Dunn's criteria, this research identifies budget posture inefficiency as the primary root cause. The dominance of operational spending at 69.02% and a Rp15.8 billion cut in basic infrastructure capital expenditure have hindered the government's ability to reach extreme poverty groups. As a solution, this policy paper recommends a mandatory Spending Re-design policy by establishing an operational spending cap of 40% and restoring capital expenditure to a minimum of 30% for relevant departments. This step is not merely an administrative effort but a humanitarian manifestation to ensure the state's presence in providing access to sanitation, clean water, and productive capital for long-neglected citizens. Consistent implementation of this policy is expected to break the chain of structural poverty and achieve genuine social justice in Aceh Besar Regency.

**Keywords:** Extreme Poverty, Severity Index ( $P_2$ ), Spending Re-design, Aceh Besar, Budget Efficiency.

## PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan di tingkat sub-nasional seringkali menampilkan data yang kontradiktif antara capaian administratif dan realitas lapangan. Di Kabupaten Aceh Besar, upaya pengentasan kemiskinan menghadapi tantangan struktural yang berat pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Meskipun secara statistik angka kemiskinan ( $P_0$ ) mengalami tren penurunan, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menunjukkan sinyal peringatan atau "alarm" bagi pemerintah daerah. Garis Kemiskinan yang terus meningkat akibat inflasi pangan memaksa kelompok masyarakat terbawah terjerebab lebih dalam ke dalam jurang ekonomi.

Urgensi penelitian ini terletak pada ketidakmampuan struktur fiskal daerah saat ini untuk merespons kebutuhan mendasar penduduk miskin ekstrem. Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2025, terlihat adanya anomali kebijakan berupa pemangkasan belanja modal infrastruktur dasar sebesar Rp15,8 miliar, yang justru merupakan jantung dari pelayanan publik bagi warga miskin. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk merumuskan ulang arah kebijakan fiskal agar lebih humanis dan tepat sasaran.

## Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Analisis kebijakan dalam artikel ini berpijak pada teori siklus kebijakan dan kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Dunn (2023) menekankan bahwa efektivitas sebuah kebijakan publik tidak hanya diukur dari luaran (*output*), tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan masalah substantif (efektivitas) melalui alokasi sumber daya yang efisien. Dalam konteks fiskal daerah, teori *Pro-Poor Budgeting* menjadi relevan untuk membedah sejauh mana keberpihakan anggaran terhadap kelompok rentan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan belanja operasional yang terlalu tinggi seringkali menyebabkan *crowding-out effect* terhadap belanja modal yang produktif. Di Aceh Besar, dominasi belanja penunjang operasional yang mencapai 69,02% dari total pagu anggaran penanggulangan kemiskinan mencerminkan adanya *mismatch* kebijakan antara perencanaan dan kebutuhan riil masyarakat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan publik untuk mengkaji berbagai permasalahan kemiskinan serta merumuskan alternatif kebijakan yang relevan dan aplikatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, terutama publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar Tahun 2025 serta dokumen perencanaan daerah, seperti Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (P-PPAS) Tahun 2025. Penggunaan data tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kemiskinan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan diagnosis masalah sebagai langkah awal penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis kondisi kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Analisis ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemiskinan serta menentukan sektor-sektor yang memerlukan intervensi kebijakan secara prioritas. Dengan demikian, diagnosis masalah menjadi dasar penting dalam memahami akar persoalan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Tahap selanjutnya adalah analisis posisi strategis menggunakan matriks SWOT melalui pendekatan Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian kemudian merumuskan berbagai alternatif kebijakan yang dievaluasi menggunakan kriteria analisis kebijakan menurut William Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui tahapan ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, realistis, dan mampu mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kondisi Eksisting dan Alarm Ketimpangan

Analisis data menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Aceh Besar sebesar 2,16% pada tahun 2025 adalah capaian yang rapuh. Fakta sosiologis-ekonomi mengungkapkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) meningkat signifikan ke angka 0,53. Hal ini berarti bahwa pengeluaran di antara penduduk miskin sendiri semakin timpang; mereka yang miskin menjadi semakin miskin dan semakin jauh dari garis kemiskinan. Kondisi ini diperburuk oleh kenaikan Garis Kemiskinan (GK) menjadi Rp598.160 per kapita per bulan, yang mengakibatkan daya beli masyarakat Desil 1 semakin tergerus.

### Diagnosis Strategis Melalui Matriks SWOT

Melalui identifikasi faktor internal dan eksternal, posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berada pada situasi yang memerlukan tindakan drastis. Secara internal, **Kekuatan** utama terletak pada ketersediaan data P3KE yang akurat dan adanya mandat regulasi melalui Inpres 8/2025. Namun, **Kelemahan** internal jauh lebih dominan, yaitu ketergantungan pada belanja operasional birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Dari sisi eksternal, **Peluang** muncul dari adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dapat dioptimalkan

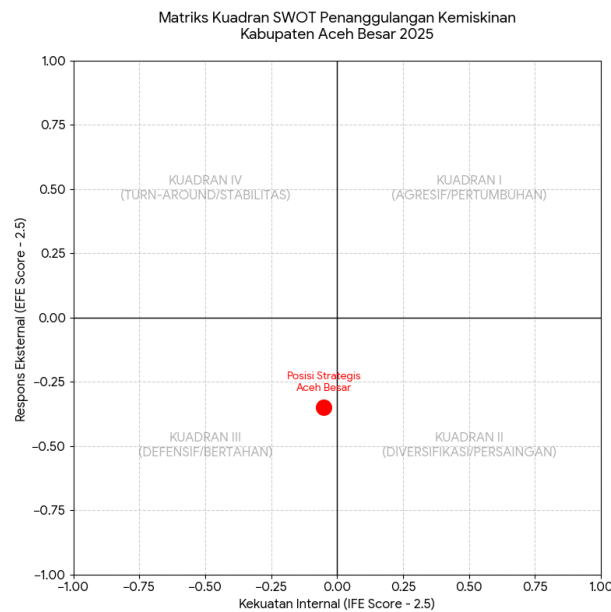
untuk infrastruktur dasar. Namun, **Ancaman** berupa inflasi pangan dan ketidakpastian ekonomi global terus menekan garis kemiskinan.

Setelah melakukan evaluasi terhadap faktor internal dan eksternal, kita dapat menentukan koordinat posisi strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam peta persaingan kebijakan publik. Koordinat ini dihitung dengan melakukan normalisasi skor terhadap titik tengah (2,50):

**Sumbu X (Internal):**  $2,45 - 2,50 = -0,05$  (Menunjukkan posisi internal yang cenderung lemah akibat dominasi belanja operasional).

**Sumbu Y (Eksternal):**  $2,15 - 2,50 = -0,35$  (Menunjukkan respon eksternal yang rendah terhadap ancaman inflasi dan kenaikan indeks keparahan  $P_2$ ).

Berdasarkan skor IFE (2,45) dan EFE (2,15) yang di hitung sebelumnya (dengan titik tengah rata-rata 2,50), posisi strategis Aceh Besar dapat dipetakan secara numerik dan visual sebagai berikut:



### Hasil Diagnosis: Kuadran III (Strategi Defensif/Bertahan)

Berdasarkan visualisasi di atas, Kabupaten Aceh Besar berada pada **Kuadran III (Defensif/Bertahan)**.

Dalam posisi ini, organisasi memiliki kelemahan internal yang besar di tengah ancaman eksternal yang nyata. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil bukanlah ekspansi program baru, melainkan perbaikan struktur internal anggaran melalui eliminasi belanja yang tidak efisien atau *Spending Re-design*.

### Pembahasan Solusi: Reorientasi Fiskal sebagai Prioritas

Narasi analisis ini menyimpulkan bahwa kegagalan mencapai target kemiskinan sebesar 13,05% dalam RPK bukan disebabkan oleh kurangnya anggaran, melainkan oleh kesalahan alokasi. Kebijakan memangkas belanja modal di saat indeks keparahan

kemiskinan meningkat adalah langkah yang kontraproduktif secara akademis maupun praktis. Pembahasan mendalam menunjukkan bahwa transformasi anggaran menuju belanja modal minimal 30% adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan layanan dasar masyarakat miskin ekstrem, seperti akses air bersih dan sanitasi, yang secara teori akan menurunkan biaya hidup masyarakat secara permanen.

## ALTERNATIF DAN PEMILIHAN KEBIJAKAN

### Dekonstruksi Alternatif Kebijakan dalam Perspektif Tekno-Struktural

Berdasarkan hasil diagnosis pada bab sebelumnya, artikel ini merumuskan tiga pilar alternatif kebijakan yang dirancang untuk mengintervensi kegagalan target pengurangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar. Alternatif pertama adalah *Spending Re-design* atau reorientasi struktur belanja daerah. Secara teoretis, kebijakan ini bertujuan untuk melakukan koreksi fiskal terhadap inefisiensi belanja penunjang operasional yang telah mencapai titik jenuh sebesar 69,02%. Melalui strategi ini, pemerintah daerah dipaksa untuk melakukan penghematan struktural pada pos belanja barang dan jasa guna memulihkan alokasi belanja modal infrastruktur yang sangat krusial bagi kelompok Desil 1.

Alternatif kedua berfokus pada *Integrated Pro-Poor Intervention* melalui penguatan manajemen data P3KE. Pendekatan ini mengedepankan sinkronisasi lintas sektor di mana 12 SKPD pengampu diwajibkan melakukan intervensi terpadu pada lokus dan sasaran yang sama secara simultan. Sementara itu, alternatif ketiga menawarkan transformasi bantuan sosial dari skema hibah konsumtif menjadi bantuan modal produktif pada sektor basis pertanian dan perikanan yang menyerap 21,02% PDRB daerah. Ketiga opsi ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan representasi dari pergeseran paradigma dari *charity-based policy* menuju *empowerment-based policy*.

### Analisis Komparatif Menggunakan Kriteria William Dunn

Pemilihan alternatif terbaik dilakukan melalui evaluasi komprehensif menggunakan enam kriteria analisis kebijakan William Dunn. Dunn (2023) menyatakan bahwa sebuah kebijakan harus diuji melalui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, ekuitas, responsivitas, dan kelayakan teknis. Dalam konteks Aceh Besar, alternatif *Spending Re-design* memperoleh keunggulan signifikan dibandingkan opsi lainnya. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, kebijakan ini dianggap sebagai solusi yang paling cepat merespons kenaikan indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) karena langsung memperbaiki alokasi dana pada sumber masalah, yakni ketimpangan belanja operasional.

Analisis ini juga menekankan aspek responsivitas terhadap tekanan inflasi yang menaikkan Garis Kemiskinan menjadi Rp598.160. Dengan memulihkan belanja modal infrastruktur dasar, pemerintah secara otomatis memberikan layanan publik yang menurunkan beban pengeluaran riil masyarakat miskin, sehingga kebijakan ini memenuhi kriteria ekuitas atau keadilan bagi kelompok termiskin. Dari sisi kelayakan teknis, strategi ini dinilai paling implementatif karena hanya memerlukan penyesuaian

pada mekanisme penyusunan anggaran dalam dokumen P-PPAS tanpa harus merombak struktur organisasi perangkat daerah secara radikal.

## REKOMENDASI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

### Rekomendasi Kebijakan: Reorientasi Fiskal Mandatori

Sebagai solusi final, artikel ini merekomendasikan penetapan kebijakan mandatori reorientasi fiskal melalui pemberlakuan *capping* atau ambang batas maksimal belanja operasional. Kebijakan ini harus ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang secara eksplisit mengatur bahwa belanja penunjang operasional pada SKPD terkait tidak boleh melebihi 40%, sementara belanja modal strategis harus ditingkatkan minimal hingga 30% dari total pagu anggaran penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi ini bersifat "mengatur" dan berfokus pada level pengambil keputusan tinggi di daerah guna memastikan adanya komitmen politik yang kuat dalam menyelamatkan kelompok miskin ekstrem.

### Peta Jalan Strategis: Transformasi Struktural 2025-2029

Keberhasilan implementasi kebijakan *Spending Re-design* tidak dapat dicapai melalui intervensi sesaat, melainkan memerlukan peta jalan strategis yang terukur selama lima tahun ke depan. Tahapan ini dirancang untuk menjawab eskalasi Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) yang saat ini menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial di Aceh Besar.

**Fase Inisiasi dan Konsolidasi Regulasi (2025)** merupakan langkah fundamental yang berfokus pada penguatan aspek legalitas. Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diwajibkan menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur ambang batas (*capping*) belanja operasional pada 12 SKPD pengampu penanggulangan kemiskinan. Output kunci dari fase ini adalah keberanian fiskal untuk memulihkan belanja modal minimal sebesar Rp15,8 Miliar dalam dokumen Perubahan APBD 2025, yang secara teoretis akan menjadi bantalan fiskal bagi kelompok Desil 1.

Memasuki **Fase Akselerasi Infrastruktur Dasar (2026)**, fokus strategi bergeser pada eksekusi pembangunan fisik yang menyentuh akar kemiskinan multidimensi. Mengacu pada data P3KE, pembangunan sarana sanitasi, akses air bersih, dan perbaikan rumah layak huni menjadi prioritas utama untuk menurunkan beban pengeluaran riil masyarakat. Fase ini menargetkan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) sebagai indikator keberhasilan teknis di lapangan.

Selanjutnya, **Fase Transformasi Ekonomi Produktif (2027)** bertujuan untuk mengubah paradigma bantuan sosial dari skema hibah konsumtif menjadi penguatan modal usaha berbasis sektor basis, seperti pertanian dan perikanan yang mendominasi 21,02% PDRB daerah. Transformasi ini krusial untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya resiliensi ekonomi lokal di tengah tekanan inflasi pangan.

Pada dua tahun terakhir, yakni **Fase Kemandirian dan Evaluasi Dampak (2028-2029)**, kebijakan diarahkan pada integrasi produk UMKM kelompok miskin ke

dalam rantai pasok pasar yang lebih luas melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Puncak dari peta jalan ini adalah evaluasi komprehensif untuk memastikan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) telah berhasil ditekan di bawah angka 0,30, serta memastikan target penurunan angka kemiskinan makro di bawah 10% tercapai secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Di balik penurunan tersebut masih terdapat persoalan mendasar, yaitu meningkatnya tingkat keparahan ekonomi yang dialami oleh kelompok masyarakat paling rentan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan kerja, serta berbagai layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada penurunan angka statistik, tetapi juga harus mampu mengurangi tingkat kerentanan dan kesenjangan yang masih terjadi.

Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakseimbangan dalam struktur penganggaran daerah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian target pembangunan. Dominasi belanja birokrasi operasional yang mencapai 69,02% dari total anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya fiskal masih terserap untuk kebutuhan administrasi pemerintahan dibandingkan dengan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas kebijakan pembangunan dalam menjangkau kelompok miskin ekstrem menjadi kurang optimal.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini merekomendasikan penerapan strategi *Spending Re-design* sebagai alternatif kebijakan yang paling rasional dan implementatif untuk mengatasi persoalan tersebut. Strategi ini menekankan pentingnya reorientasi kebijakan fiskal melalui efisiensi belanja internal dan pengalihan anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan keberanian politik pemerintah daerah dalam melakukan reformasi penganggaran secara lebih progresif. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil, diharapkan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat miskin ekstrem sehingga tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Aceh Besar dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2025). Profil Kemiskinan Kabupaten Aceh Besar 2025 (Vol. 2). BPS Aceh Besar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2025). Statistik Daerah Kabupaten Aceh Besar 2025. BPS Aceh Besar.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2024). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024. Bappeda Aceh Besar.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2025). Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (2025). Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025. Bappeda Aceh Besar.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sekretariat Negara.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kementerian Dalam Negeri.
- Pusbindiklatren Bappenas. (2025). Panduan Penulisan Policy Paper bagi Jabatan Fungsional Perencana. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2024). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Dunn, W. N. (2023). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (7th ed.). Routledge.
- Firmansyah, A., & Nasution, H. (2024). Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Efektivitas Belanja Modal di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (SINTA 2)*, 15(1), 45-60.
- Hidayat, T. (2024). Dampak Infrastruktur Dasar terhadap Penurunan Kemiskinan Multidimensi di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (SINTA 2)*, 35(2), 112-128.
- Idris, M., & Sari, K. (2024). Efisiensi Belanja Operasional dan Reorientasi Fiskal Daerah: Studi Kasus Kabupaten di Aceh. *Jurnal Akuntansi Pemerintah (SINTA 3)*, 9(1), 22-38.
- Nasution, M., dkk. (2023). Evaluasi Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Aceh Development Journal*, 7(2), 88-105.

- Putra, R. (2024). Fragmentasi Kebijakan dan Ego Sektoral dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia. *Policy & Governance Review (Scopus Q3)*, 8(1), 15-32.
- Rusmadi, S. (2025). Dinamika Garis Kemiskinan dan Tekanan Inflasi Pangan di Kabupaten Penyangga. *Jurnal Statistik dan Aplikasi*, 9(1), 1-14.
- Sari, D. P. (2024). Akurasi Data P3KE dan Inclusion-Exclusion Error dalam Pemberian Bantuan Sosial. *Jurnal Sosio Konsepsia (SINTA 2)*, 13(3), 201-215.
- Suryahadi, A., & Ridho, M. (2025). The Paradox of Poverty Reduction: Why Severity Index Increases When Poverty Rate Falls. *Bulletin of Indonesian Economic Studies (Scopus Q1)*, 61(1), 40-58.
- Young, E., & Quinn, L. (2023). *The Policy Brief: Guiding Principles and Practical Examples for Policy Writers*. International Centre for Policy Advocacy.